

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2020, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hardani, dkk., 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Imam Gunawan, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan penegakan hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Joko Sriwidodo, 2022, *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesisa*, Yogyakarta, Penerbit Kepel Press.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya*, Alumni, Bandung.

- M. Subana dan Sudrajat, 2005, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ghalia, Jakarta.
- , 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maya Shafira, Deni Achmad, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusak Media, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta.
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Indonesia Crisis Center, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 12, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryati, Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Cetakan I.* Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Yenti Ganarsih, 2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Proses dan Tantangan Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Aswanto, Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 1, 2018.

Dewi Ratnasari Rustam dan Audina Al Amira Abdiansyah, Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga atas Aset yang Dirampas Terkait dengan Tindak Pidana Narkotika, *Delarev*, Vol 3 No.1, 2024.

Diska Marlianti, Tata Cara Pengajuan Keberatan Perampasan Barang Bukti yang Tidak Terkait dengan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika, *Tesis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2025.

Wilki Angga Lineleyan, dkk., Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti, *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 5, 2024.

Natasya Klarisa Paruntu dan Amad Sudiro, Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara, *Jurnal USM Law Review*, Vol 8, No 3, 2025.

Putra Pratama dan Nursiti, Penyitaan Barang Bukti Milik Pihak Ketiga yang Dirampas oleh Negara dalam Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Kabupaten Aceh Besar), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang hukum Perdata*, Vol. 3, No. 3, 2019.

Riza Alifianto Kurniawan, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 5, 2022.

Romy Bobby Manumpahi, dkk., Pengembalian Barang Bukti dalam Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, April 2021.

Syukron, Muhammad, Prosedur Perlawanan Pihak Ketiga dalam Kasus Perampasan Barang Bukti Narkotika, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, 2022.

Vanya Shafa Nabilla Andreas dan Effendy Saragih, Perampasan Barang Bukti Untuk Negara Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No.342/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt), *Jurnal e-ISSN*, Vol. 1 No. 1, 2024.

Yan Tomyos Gultom, "Pengajuan Keberatan atas Perampasan Barang oleh Pengadilan Negeri dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Bekasi), *Skripsi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2009.

Peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Keempat, Tahun 2002.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 *tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Pelaksana dan Lembaga Teknis

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pidana*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 1994.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 *tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Republik Indonesia, Kepolisian Negara RI, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan Kepolisian Negara RI*, Jakarta, Kepolisian Negara RI, 2014.

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2017.

Republik Indonesia, Kementerian Keuangan RI, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2022.

Website dan Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 157/Pid.sus/2024/PN.LSM

Penetapan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 2/Keberatan Pid.Sus/2024/PN Lsm

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengelolaan Barang Rampasan Negara*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13003/Tinjauan-Yuridis-Kewenangan-Pengelolaan-Barang-Rampasan-Negara.html>, diakses 12 Agustus 2025.

Rafli Fadilah Achmad, “Keberatan Pihak Ketiga dalam Perampasan Barang Bukti Perkara Narkotika”, artikel opini, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dipublikasikan di <https://pn-lhokseumawe.go.id/2025/02/keberatan-pihak-ketiga-dalam-perampasan-barang-bukti-perkara-narkotika-oleh-rafli-fadilah-achmad-sh-mh/> diakses pada 30 April 2025.

Wawancara

Muhammad Andri Ghafari, S.H., M.H., Jaksa Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, wawancara pribadi, Lhokseumawe, 21 Agustus 2025.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara pribadi, Lhokseumawe, 22 Agustus 2025.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe,
wawancara pribadi, Lhokseumawe, 20 Februari 2026.